BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia telah menghasilkan otonomi daerah yang berdampak signifikan. Otonomi ini mulai dilaksanakan pada tahun 1999 dan diharapkan dapat membantu meningkatkan berbagai fungsi pemerintahan. Berkat otonomi, daerah diizinkan untuk mengelola urusannya sendiri, meskipun pemerintah pusat tetap mengawasi bagaimana pemerintahan daerah tersebut beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Ishak et al., 2020). Regionalisasi diharapkan dapat mendorong kemajuan di berbagai bidang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Untuk mencapainya, setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri, atau dengan kata lain, mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan terpenting setiap daerah (Yudiastuti dkk., 2025). Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan PAD yang dapat ditunjukkan melalui pelaksanaan anggaran pendapatan (Dewi & Wiguna, 2019). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah kepatuhan wajib pajak, efektivitas pimpinan daerah, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belanja pemerintah (Diarta dkk, 2017). Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, serta terbatasnya kapasitas pemerintah daerah.

Untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah, pemerintah pusat menyetujui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan saling dukung keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa apabila suatu daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang penting terkait dengan pelayanan dasar, pemerintah pusat berwenang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan memberikan bantuan. Lebih jauh, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibiayai dengan sumber daya selain pinjaman atau bantuan internasional. Undang-undang ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang tersedia guna membiayai biaya operasional dan pembangunan daerah.

Upaya dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah melalui PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kompensasi, pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak sumber daya air permukaan, dan pajak hasil rokok. Pajak Kabupaten antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Meiriasari & Ratu, 2021).

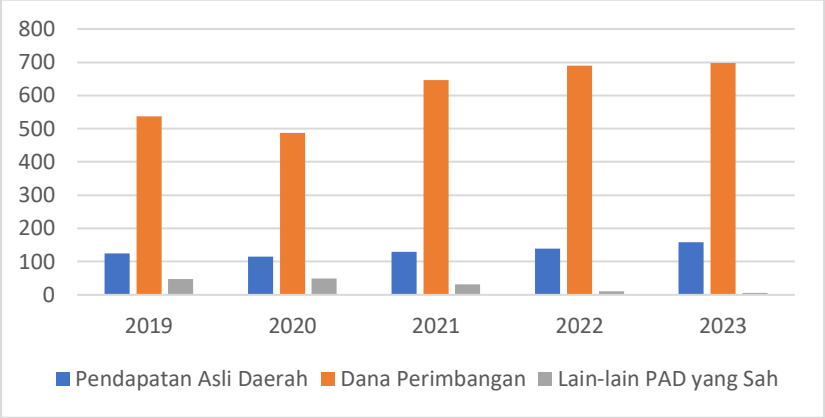

Gambar 1.1 Diagram Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2019-2023
Sumber: (BPS, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia sangat bergantung pada Dana Perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bahwa Dana Perimbangan bersumber dari penerimaan APBN yang dibagikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah sumber Dana Perimbangan yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula beban fiskal yang ditanggung pemerintah pusat terhadap APBN dalam rangka desentralisasi, mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN (Masdiantini et al., 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendorong otonomi dan kelangsungan pertumbuhan daerah. Sebagai sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri, PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Areros, 2024). Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi, di

mana daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan kebutuhannya secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah tertentu, dan masukan daerah lainnya yang sah. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, yang pada gilirannya memperkuat otonomi dan kemampuan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Berikut statistik terkait perolehan pendapatan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 PAD Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	126.477.267	133.698.784	148.045.103	185.004.035	175.992.613
Kab. Tabanan	363.370.469	354.558.239	313.042.530	362.314.631	436.408.393
Kab. Badung	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226	3.705.745.447
Kab. Gianyar	770.204.849	997.478.368	545.869.873	430.172.109	857.553.633
Kab. Klungkung	186.974.284	225.063.772	220.893.875	254.494.496	309.462.458
Kab. Bangli	122.686.254	127.040.436	104.325.150	163.537.096	144.005.843
Kab. Karangasem	200.361.247	233.013.033	219.176.733	252.688.747	301.332.231
Kab. Buleleng	335.555.494	365.595.301	318.986.891	391.988.445	410.564.892
Kab. Denpasar	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414	888.051.856
Provinsi Bali	3.718.499.635	4.023.156.316	3.069.474.218	3.117.070.009	3.863.191.407

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 1. Pendapatan Asli Daerah yang memiliki terlihat bahwa Kabupaten Badung memiliki PAD tertinggi setiap tahunnya, mencerminkan potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pariwisata. Namun, terdapat penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi, terutama pariwisata. Kabupaten Denpasar juga menunjukkan tren PAD yang cukup tinggi, mengingat

posisinya sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi. Tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan PAD di hampir semua daerah, terutama di Badung, Gianyar, dan Denpasar, yang kemungkinan besar berkaitan dengan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi Bali pasca pandemi. Secara keseluruhan, PAD Provinsi Bali mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam di tahun 2020 tetapi mulai meningkat kembali pada tahun 2022.

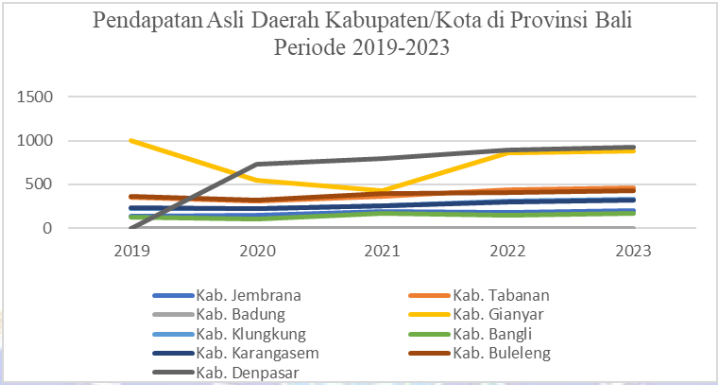

Gambar 1.2 Diagram Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2023
Sumber: (BPS, 2023)

Namun, dibalik tingginya PAD dari suatu daerah di Provinsi Bali masih terdapat daerah yang memiliki PAD yang jauh dibawah daripada daerah-daerah lainnya di Provinsi Bali. Dari data yang diperoleh melalui BPS Provinsi Bali periode 2018-2023 menunjukkan hasil Kabupaten Bangli menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain selama periode 2018-2023. Rendahnya realisasi PAD di Kabupaten Bangli merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Faktor utama yang dapat menjadi penyebab rendahnya PAD di Kabupaten Bangli menurut wawancara peneliti dengan ketua Badan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) kabupaten Bangli yaitu Bapak Astawa menyatakan,

> *potensi yang dimiliki memang terbatas dibandingkan dengan daerah lain dan hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata sedangakan sektor yang paling menompang untuk PAD yaitu pajak daerah namun kondisi potensi pajak daerah di Kabupaten Bangli itu terbatas dilihat dari objek pajak yang sedikit seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya mengandalkan kawasan wisata di Desa Kintamani.*

Selain itu menurut BPS Provinsi Bali (2023) Bangli memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup rendah dibandingkan kabupaten lain, yakni 6,9. Hal ini menjadi tantangan utama Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, Kabupaten Bangli hanya mengandalkan bantuan pemerintah berupa uang tunai, karena belum memanfaatkan sumber dayanya secara efisien.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, karena berfungsi sebagai indikator efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatannya (Priyadharsini, 2023). Tingginya tingkat keberhasilan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh dari pajak daerah, kontribusi, dan pengelolaan aset independen di daerah. Sebaliknya, rendahnya realisasi PAD dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pemungutan atau pengelolaan sumber daya daerah (Syahril dkk, 2023). Berikut ini disajikan anggaran dan pelaksanaan PAD Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2019	136.167.572.433,15	121.916.992.922,13	(14.250.579.511,02)	89,53%
2020	104.796.184.853,95	104.325.150.582,49	(471.034.271,46)	99,55%
2021	119.586.087.540,00	163.537.095.767,82	43.951.008.227,82	136,75%
2022	147.126.416.529,00	144.005.842.858,50	(3.120.573.670,50)	97,88%
2023	255.527.244.826,00	219.918.641.353,81	(35.608.603.472,19)	86,06%

(Sumber: BKPD Bangli, 2023)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target anggaran. Salah satu permasalahan utama adalah fluktuasi yang signifikan dalam persentase realisasi terhadap anggaran. Pada tahun 2021, realisasi PAD melampaui anggaran hingga 136,75%, yang menunjukkan estimasi anggaran yang kurang akurat atau adanya peningkatan pendapatan yang tidak terduga. Sebaliknya, pada tahun 2023, realisasi PAD hanya mencapai 86,06% dari target anggaran, dengan selisih defisit sebesar Rp35,6 miliar, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD. Tren penurunan persentase realisasi sejak 2021 hingga 2023 juga mengindikasikan potensi kendala dalam optimalisasi pendapatan daerah, baik dari segi kebijakan pemungutan, kepatuhan wajib pajak, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan regulasi. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan fiskal daerah dan menghambat program pembangunan yang bergantung pada sumber pendapatan tersebut.

Secara geografis Kabupaten Bangli terletak di daerah yang tidak memiliki wilayah laut yang luasnya sebesar 520,81 km. Sektor industri masyarakat bangli digerakkan dan bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, dan perdagangan saja. Sedangkan untuk sektor pariwisata

masih belum ammpu untuk berkembang dan mengoptimalkan sumber potensial. Sektor wisata belum secara optimal berkembang karena belum adanya pemerataan pengembangan pariwisata bangli secara menyeluruh yang dimana hanya terkonsentrasi di kintamani saja. Padahal daerah lain juga memiliki potensi pariwisata juga seperti di Bangli Timur ada kerajinan bambu, dulang, wisata air terjun dan alamnya mempunyai potensi yang besar begitu juga daerah barat dengan ukiran dan alam luar biasa. Sedangkan di Kintamani Barat terdapat industri pertanian kopi dan *agriculture* yang laur biasa potensinya. Selanjutnya di Kintamani Timur Bangli dengan *Geopark* yang pertama di Bangli dengan alam yang begitu indah juga belum berkembang secara lebih pesat lagi (Gatra.com, 2023).

Pendapatan masing-masing daerah harus diarahkan untuk pertumbuhan pariwisata, yang dapat dikelola dan diubah menjadi sumber peningkatan DAP. Jika pembangunan daerah terutama bergantung pada penyediaan dana kompensasi, kemajuan ini akan menghadapi kendala. Namun, jika dapat didukung oleh DAP, perencanaan pembangunan daerah dapat ditingkatkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan kesejahteraannya.

Tingginya piutang pajak di Kabupaten Bangli dan rendahnya realisasi retribusi daerah tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya capaian realisasi PAD. Terlebih lagi pajak daerah sebagai pendapatan utama PAD Kabupaten Bangli yang penerimanya masuk sepenuhnya ke kas daerah. Permasalahan pajak daerah juga terkadang muncul tidak hanya dari wajib pajak yang membayar pajak, namun kepatuhan terhadap pajak dengan adanya pembayaran pajak, tetapi belum sesuai dengan aturan (Yudantara & Yuniarta, 2020). Kurangnya pengetahuan perpajakan

berpotensi menurunkan kepatuhan membayar pajak (Yasa dkk, 2021). Namun pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh masing-masing komponen PAD dan bukan hanya mengandalkan pajak daerah saja. Semakin tinggi tingkat capaian dari realisasi PAD dari yang sudah ditargetkan maka akan menjadi indikasi menunjukkan pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola pendapatan daerahnya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai di bagian keuangan di Kantor BKPAD Kabupaten Bangli yaitu Ibu Sumi menyatakan,

> *Besarnya piutang pajak di Kabupaten Bangli didominasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan pada Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 35 miliar. Sisa piutang pajak lainnya bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).*

Pemilihan rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat dinamika dan perkembangan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan domestiknya. Sementara itu, rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi PAD mampu mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara lebih objektif.

Dengan mengaitkan kedua rasio tersebut pada kerangka teori pertumbuhan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk menilai kontribusi komponen-komponen PAD terhadap peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Bangli, yang pada akhirnya

dapat berimplikasi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan masing-masing komponen PAD dapat diukur menggunakan rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Tingkat pertumbuhan digunakan untuk menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya dari satu periode ke periode berikutnya (Hasugian et al., 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Meiriasari & Ratu (2021) yang menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan sangat berfluktuatif untuk mengetahui pertumbuhan komponen PAD terhadap realisasi PAD suatu daerah. Sedangkan indeks efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan target yang belum tercapai. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya, maka pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mencapai tujuan PAD (Faud, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Rizal & Muhamad (2018) yang menetapkan bahwa rasio efektivitas merupakan bagian dari kriteria yang tepat untuk menilai efektivitas pengembangan komponen PAD dalam kaitannya dengan pelaksanaan PAD di suatu daerah.

Total kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah didasarkan atas porsi masing-masing unsur, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah, yang besarnya dapat dikuantifikasi. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Lebih jauh, besarnya pendapatan daerah yang terkumpul menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam menghimpun pendapatan daerah. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara dapat diketahui dari tingkat efektivitas dan tingkat

pertumbuhannya untuk menganalisis kemajuan dan efisiensi unsur-unsur PAD dalam kaitannya dengan pemenuhan tujuan PAD.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Apriliadewi et al., (2024) pada penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD. Dimana pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa rasio efektivitas merupakan rasio yang relevan dan akurat dalam menganalisis komponen PAD terhadap realisasi PAD. Perbedaan utama pada penelitian ini terletak pada variabel kompenen PAD yang lebih luas, periode waktu penelitian dan juga penggunaan rasio pertumbuhan sebagai analisis komponen PAD terhadap realisasi PAD. Penggunaan rasio pertumbuhan sebagai analisis komponen PAD terhadap realisasi PAD didasarkan pada penelitian Meiriasari & Ratu (2021) yang menunjukkan bahwa rasio yang paling baik dan akurat dalam menganalisis PAD terhadap realisasi PAD pada sektor pemerintahan adalah rasio pertumbuhan.

Beberapa penelitian lain yang menjadi dasar dan acuan penelitian ini yaitu Rizal & Muhamad (2018), Hidayah (2020), Syamsul (2020), Alawiah et al., (2022) Jirina & Suherty (2023), Mawadah (2023), dan Hanifa & Sofianty (2023). Rata-rata perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel komponen PAD yang berbeda. Selain itu perbedaan dalam waktu periode penelitian dan variasi dari rasio analisis yang digunakan juga menjadi perbedaan pada penelitian ini.

Pada beberapa penelitian rata-rata didapatkan hasil akurasi yang bervariasi tergantung pada variabel penelitian dan periode penelitian. Namun, hingga nsaat ini, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait keakuratan masing-masing rasio tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan

melakukan analisis terhadap akurasi rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas dalam melihat pertumbuhan komponen PAD terhadap realisasi PAD di Kabupaten Bangli. Sehingga melalui rasio ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman tentang rasio mana yang paling efektif dalam melihat pertumbuhan komponen PAD terhadap realisasi PAD setiap daerah.

Termotivasi oleh fenomena tersebut di atas, penulis berupaya untuk meneliti masalah PAD. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengkaji empat unsur PAD: pajak daerah, pembayaran daerah, aset daerah yang dikelola, dan pendapatan PAD lain yang diizinkan. Peneliti juga mempertimbangkan jangka waktu lima tahun untuk analisisnya. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung besar pertumbuhan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Realisasi PAD Kabupaten Bangli, sehingga Pemerintah Daerah memiliki keputusan yang jelas dalam pengelolaan PAD. Maka penulis mengambil judul "Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi PAD Kabupaten Bangli".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari informasi yang dipaparkan di atas, dapat dikenali beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali.
2. Potensi pajak daerah Kabupaten Bangli belum dilakukan secara optimal sehingga capaian realisasi pajak daerah terhadap PAD masih rendah.

3. Besarnya piutang pajak daerah Kabupaten Bangli yang menurut data BKPAD Kabupaten Bangli per Desember 2023 mencapai Rp. 38 miliar, dengan piutang pajak daerah tertinggi yaitu Pajak PBB sebanyak Rp. 35 miliar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka untuk mempersempit ruang lingkup analisis, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan PAD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan memperhatikan potensi pariwisata Kabupaten Bangli belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan batasan-batasan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa efisien dan berhasilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?
2. Seberapa efektif dan efisien pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?
3. Bagaimana dampak dan perkembangan pajak daerah terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?

4. Bagaimana efektivitas dan pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023?
5. Bagaimana efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lainnya dibandingkan dengan kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli antara tahun 2019 dan tahun 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas dan tingkat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif dan sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah telah efektif dan berkembang dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
4. Untuk menguji efektivitas dan perkembangan hasil pengelolaan aset daerah secara terpisah dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
5. Menelaah perkembangan dan keberhasilan Pendapatan Asli Daerah asli lainnya dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang evolusi, efektivitas, dan efisiensi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan PAD.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Penulis**

   Sebagai sarana untuk mengetahui ruang lingkup perpajakan di daerah, pajak-pajak daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat mandiri, dan lain-lain PAD yang sah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. **Bagi Badan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli**

   Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BKPAD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (RAI) yang bersumber dari kekayaan daerah.

3. **Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

   Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pemutakhiran dan penyempurnaan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan guru tentang kajian pengaruh unsur pendapatan asli daerah terhadap PAD.

4. **Bagi Masyarakat/Pembaca**

   Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan data dan wawasan mengenai peningkatan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terhadap RAR.